

**KEWIRAUSAHAAN SOSIAL PADA PENYANDANG
DISABILITAS INTELEKTUAL DI SENTRA
TERPADU KARTINI TEMANGGUNG**

BAB II

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Pekerjaan Sosial (S.Tr.Sos)**

**PEMBIMBING:
Dr. RADEN ENKEU AGIATI, M.Si.
Drs. SUHENDAR, MP.**

**OLEH:
MUHAMMAD ANWAR RIDHO
NRP. 19.04.150**



**PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG 2023**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan langsung dengan tema penelitian. Selain itu, peneliti melihat penggunaan metode dan hasil yang terdapat dalam penelitian terdahulu. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti:

1. Bob Fester, 2018, *Pengaruh Program Kewirausahaan Sosial Terhadap Kepercayaan Merek (Studi Kasus Komunitas Disabilitas Bandung, Indonesia)*, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wirausaha sosial terhadap kepercayaan merek (*brand*) dalam program Disabilitas Punya Karya (DPK) berdasarkan teori kewirausahaan sosial oleh Shane & Venkataraman (2000) dan kepercayaan merek berdasarkan Ballester, (2004). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kausal atau eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif, dimana data informasi dikumpulkan dari populasi, dan dikumpulkan kemudian dianalisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan teknik analisa data menggunakan metode *partial least square* (PLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh wirausaha sosial terhadap kepercayaan merek (*brand*) adalah 73,6%. Namun, program Disabilitas Punya Karya (DPK) sendiri perlu dievaluasi secara berkala. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas produk yang lebih tinggi masih harus

diselesaikan jika Disabilitas Punya Karya (DPK) ingin anggotanya memiliki bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan sangat penting bahwa konsumen menanamkan rasa percaya terhadap produk.

2. A. Tenrippi, 2019, *Kewirausahaan Sosial di Indonesia (Apa, Mengapa, Kapan, Siapa, dan Bagaimana)*, STIA Al Gazali Barru.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kewirausahaan sosial di Indonesia (apa, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan informasi dari lapangan secara apa adanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berupa literatur seperti jurnal dan buku-buku terkait kewirausahaan sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial adalah suatu terobosan baru sebagai sebuah aktivitas bisnis dalam mengatasi masalah sosial yang melibatkan penggunaan semua sumber daya secara inovatif untuk mempercepat perubahan sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.

3. Budi Hasanah. dkk, 2022, *Kewirausahaan Sosial: Partisipasi Masyarakat dan Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi*, Universitas Serang Raya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi dan dampak sosial ekonomi dari program UMKM dengan model *social entrepreneurship* di Kota Serang khususnya pada jenis usaha design and fashion, crafting (handmade aksesoris dan supply bahan-bahan kerajinan), dan tour and travel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktor UMKM kewirausahaan sosial sudah memiliki capaian yang efektif melalui keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok, motivasi individu untuk memberikan kontribusi dan rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan. Selain itu dampak sosial ekonomi dalam konteks kewirausahaan sosial telah menghasilkan kapasitas dan kemandirian dalam membuka peluang usaha. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah Kota Serang dan kebijakan yang mampu mengakomodir peluang ekonomi dan merepresentasikan nilai-nilai sosial kewirausahaan di masa depan secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada ketiga penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian yang dilakukan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Hal-hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Berikut di bawah ini adalah matriks 2.1 penelitian terdahulu:

Matriks 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Bob Fester	Pengaruh Program Kewirausahaan Sosial Terhadap Kepercayaan Merek (Studi Kasus Komunitas Disabilitas	Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh wirausaha sosial terhadap kepercayaan merek adalah 73,6%. Namun,

1	2	3	4	5
		Disabilitas Bandung, Indonesia)		program Disabilitas Punya Karya (DPK) sendiri perlu dievaluasi secara berkala.
2.	A. Tenrippi	Kewirausahaan Sosial Di Indonesia (Apa, Mengapa, Kapan, Siapa, dan Bagaimana)	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial adalah suatu terobosan baru sebagai sebuah aktivitas bisnis dalam mengatasi masalah sosial yang melibatkan penggunaan semua sumber daya secara inovatif untuk mempercepat perubahan sosial dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.
3.	Budi Hasanah. dkk,	Kewirausahaan Sosial: Partisipasi Masyarakat Dan Evaluasi Dampak Sosial-Ekonomi	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktor UMKM kewirausahaan sosial sudah memiliki capaian yang efektif melalui keterlibatan mental dan emosi individu dalam melakukan aktivitas kelompok, motivasi individu untuk memberikan kontribusi dan rasa tanggung jawab dalam diri individu terhadap aktivitas kelompok dalam usaha pencapaian tujuan.

Ketiga penelitian tersebut menjadi dasar teori bagi peneliti dalam membuat penelitian yang akan dilakukan. Peneliti mendapatkan informasi terkait beberapa hal yang berhubungan langsung dengan tema penelitian. Penelitian yang akan

dilakukan diharapkan dapat menunjukkan dan menghasilkan suatu kebaruan pengetahuan serta berbagai informasi yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian berbeda untuk mendapatkan hasil yang terbaru.

Setiap metode dalam penelitian memiliki karakteristik tertentu serta penggunaannya tidak didasarkan pada kepentingan peneliti. Metode penelitian yang biasa digunakan dalam suatu penelitian adalah kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Metode penelitian yang digunakan memiliki desain penelitian yang beragam serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. Fungsi metode penelitian adalah sebagai alat bantu, sehingga penggunaannya disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan matriks penelitian terdahulu di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan ketiga penelitian tersebut terletak pada metode, objek dan lokasi penelitian, sehingga berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan. Metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan kuantitatif dengan statististik deskriptif. Selain itu, terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu penggunaan variabel kewirausahaan sosial.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan tentang Kewirausahaan Sosial

2.2.1.1 Pengertian tentang Kewirausahaan Sosial

Santoso (2007) menyatakan secara sederhana bahwa kewirausahaan sosial adalah tindakan seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan

kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial, baik bidang kesejahteraan, pendidikan maupun kesehatan. Anas (2019) menyatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan bentuk penggabungan antara konsep kewirausahaan yang mengedepankan pada kegiatan ekonomi namun tujuan yang dicapai tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga pada tujuan sosial. Selanjutnya Hulgard (2010) merangkum pengertian kewirausahaan sosial dengan lebih komprehensif, yaitu sebagai penciptaan nilai sosial yang dibentuk dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau organisasi masyarakat yang terlibat dalam suatu inovasi sosial yang biasanya menyiratkan suatu kegiatan ekonomi.

Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan sosial adalah suatu kegiatan kewirausahaan yang bergerak pada sektor ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan melainkan juga untuk mengatasi permasalahan sosial di dalam masyarakat. Kewirausahaan sosial memiliki tujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat. Kewirausahaan sosial diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada serta memperbaiki tingkat kesejahteraan di berbagai sendi kehidupannya.

2.2.1.2 Elemen-Elemen Kewirausahaan Sosial

Palesangi (2013) berpendapat bahwa kewirausahaan sosial terdiri dari empat elemen utama, yaitu :

1. *Social Value*.
Merupakan elemen paling khas dari *social entrepreneurship* yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. *Civil Society*.
Social entrepreneurship pada umumnya berasal dari inisiatif dan

partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

3. *Innovation.*

Social entrepreneurship memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.

4. *Economic Activity.*

Social entrepreneurship yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis/ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Berdasarkan hal di atas, beberapa elemen tersebut menjadi salah satu komponen terpenting dalam menjalankan kegiatan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial dapat tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat apabila terdapat berbagai unsur pembentuknya. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan sosial menjadi salah satu solusi yang dapat diwujudkan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat ataupun komunitas.

2.2.1.3 Aspek Kewirausahaan Sosial

Eddy Soeryanto Soegoto (2009:6) mengemukakan watak wirausahawan dalam menjalankan kewirausahaan sosial antara lain:

1. Kemandirian;
2. Ketekunan;
3. Kemampuan;
4. Kreativitas; dan
5. Komitmen.

Secara prinsip, aspek pada kewirausahaan dengan kewirausahaan sosial tidak jauh berbeda. Hal yang menjadi perbedaan antara kewirausahaan dan kewirausahaan sosial adalah tujuan atau target yang ditetapkan dalam usaha tersebut. Kewirausahaan secara umum lebih menekankan pada tujuan akhir yaitu keuntungan atau profit di dalam usaha yang dirintis. Sedangkan kewirausahaan

sosial merupakan suatu terobosan baru bagi masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk pengentasan permasalahan sosial.

2.2.1.4 Bentuk-Bentuk Kewirausahaan Sosial

Bentuk kewirausahaan sosial menurut Tan dalam (Akmalur Rijal, dkk 2018), yaitu:

1. **Organisasi berbasis komunitas**
Organisasi semacam ini biasanya dibuat untuk mengatasi masalah tertentu dalam komunitas (kelompok masyarakat), misalnya menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak miskin, panti sosial untuk anak terlantar dsb.
2. *Socially responsible enterprises*
Wirausaha sosial ini berbentuk perusahaan yang melakukan usaha komersial untuk mendukung/ membiayai usaha sosialnya. Sebagian keuntungan yang didapatkan dari organisasi profit ditujukan untuk mendukung/membiayai usaha sosialnya.
3. *Social Service Industry Professionals*
Bentuk usaha ini sedikit berbeda, yaitu pengusaha yang menjadikan jasa sosial sebagai konsumennya. Usaha ini menggandeng organisasi yang bergerak di bidang sosial sebagai konsumennya.
4. *Socio-economic atau dualisticenterprises*
Wirausaha sosial ini berbentuk perusahaan komersial yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip sosial. Misalnya perusahaan yang melakukan daur ulang sampah rumah tangga, organisasi yang mempekerjakan orang cacat, kredit mikro untuk masyarakat pedesaan dan didedikasikan untuk mendukung layanan sosialnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap bentuk kewirausahaan sosial memiliki karakteristik dan ciri khas tertentu yang dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Karakteristik mendasar pada kewirausahaan sosial tidak hanya sekadar berorientasi pada keuntungan, melainkan juga melakukan suatu pemberdayaan masyarakat atau komunitas berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat dalam kewirausahaan sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi atau sumber yang

tersedia. Apabila pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berkelanjutan maka permasalahan sosial akan tertangani dengan relatif cepat.

2.2.1.5 Kegiatan Kewirausahaan Sosial

Menurut Gregory Dees dalam (Hardi Utomo, 2014) bahwa kewirausahaan sosial adalah kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang lazim berlaku di dunia bisnis. Kegiatan kewirausahaan sosial dapat meliputi:

1. Kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba;
2. Melakukan bisnis untuk tujuan sosial; dan
3. Campuran dari kedua tujuan itu, yakni tidak untuk mencari laba dan mencari laba, namun untuk tujuan sosial.

Kewirausahaan sosial merupakan salah satu terobosan baru serta inovasi kegiatan kewirausahaan yang bertujuan pada pengentasan permasalahan sosial. Kegiatan kewirausahaan sosial dapat mencari keuntungan dimana hal tersebut tidak dinikmati secara perseorangan atau individual melainkan secara bersama-sama. Keuntungan pada kewirausahaan sosial dikembalikan untuk pembiayaan operasional usaha dengan tetap memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah disepakati.

2.2.1.6 Kategori Kewirausahaan Sosial

Terdapat tiga macam kategori kewirausahaan sosial menurut (Malunga, Iwu, & Mugobo, 2014), yaitu:

1. *Social Bricoleurs*
Mereka yang mengalami langsung masalah sosial di komunitasnya dan memiliki tujuan untuk memecahkan isu sosial yang ada di komunitas;
2. *Social Constructionist*
Mereka yang dapat mengenali potensi yang ada; dan
3. *Social Engineers*
Mereka yang berfokus pada isu berskala luas.

Berdasarkan hal di atas, kewirausahaan sosial dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kewirausahaan sosial dapat memanfaatkan potensi dan berbagai sumber yang terdapat di lingkungan sekitarnya baik berupa sumber material dan non material. Selain itu, kegiatan dalam kewirausahaan sosial dapat menangani permasalahan sosial dengan skala luas seperti kemiskinan, sehingga dengan adanya kewirausahaan sosial membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2.2.1.7 Peran Kewirausahaan Sosial

Peran kewirausahaan sosial menurut Santosa (2007) dalam (Irma Paramita Sofia, 2015) antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan kesempatan kerja;
2. Melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat;
3. Menjadi modal sosial; dan
4. Peningkatan kesetaraan.

Berdasarkan hal di atas, sangatlah banyak manfaat dari adanya kegiatan kewirausahaan sosial khususnya bagi lingkungan masyarakat dalam mengentaskan permasalahan sosial. Kewirausahaan sosial dapat menjadi suatu wadah bagi pemberdayaan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga diharapkan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan. Dengan demikian, kewirausahaan sosial merupakan suatu langkah yang tepat guna mempercepat perubahan-perubahan kondisi masyarakat ke arah lebih baik.

2.2.2 Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

2.2.2.1 Pengertian tentang Penyandang Disabilitas

World Health Organization (WHO) di dalam Murtie (2016: 88)

menjelaskan bahwa disabilitas adalah:

“Keterbatasan atau kurangnya kemampuan organ sehingga mempengaruhi kemampuan fisik atau mental untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturannya atau masih dalam batas normal, biasanya digunakan dalam level individu.”

Pendapat tersebut sejalan dengan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas yaitu:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah:

“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri atas: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental (ganda)”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki gangguan dan keterbatasan pada aspek fisik, sensorik, mental dan/atau intelektual. Keterbatasan tersebut dialami dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghambat dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat secara baik. Penyandang disabilitas secara umum mengalami gangguan keberfungsian sosial akibat tidak mampu melaksanakan

status dan peran yang sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan layaknya manusia normal.

2.2.2.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, antara lain:

1. Disabilitas Fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan *achondroplasia* (manusia kerdil).
2. Disabilitas Intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar & *down syndrom*.
3. Disabilitas Mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:
 - 1) Psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, *anxietas* dan gangguan kepribadian.
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Disabilitas Sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas sensorik netra, disabilitas runtu dan/ atau disabilitas wicara.
5. Disabilitas Ganda merupakan gabungan dari dua jenis kedisabilitan yang dialami oleh seseorang. Sebagai contoh disabilitas ganda antara lain disabilitas fisik dan mental, fisik dan intelektual, fisik dan sensorik, sensorik dan mental, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang mengalami kekurangan pada aspek fisik, mental, dan psikologis disebut sebagai penyandang disabilitas. Kedisabilitan yang dialami oleh seseorang memiliki berbagai kebutuhan dan penanganan khusus. Perlu adanya suatu program pelayanan bagi penyandang disabilitas yang tepat. Penanganan yang tepat pada penyandang disabilitas diharapkan dapat membantu dalam mengembalikan keberfungsian sosial di lingkungan masyarakat.

2.2.2.3 Faktor-Faktor Penyebab Penyandang Disabilitas

Menurut Soemantri (2012: 44) faktor penyebab penyandang disabilitas ada tiga, yaitu:

1. Faktor bawaan

Terdapat beberapa macam yang dapat dikategorikan dalam faktor bawaan ini, yang meliputi faktor gen dan rhesus kedua orang tua anak, kromosom yang tidak sempurna dan pembelahan sel telur dan sperma berkualitas buruk.

2. Faktor kecelakaan

Terdapat beberapa macam yang dapat dikategorikan dalam faktor kecelakaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi ibu yang mengalami sakit saat mengandung;
- 2) Ibu yang sering mengkonsumsi obat-obatan;
- 3) Kesulitan saat mengalami proses melahirkan karena letak bayi sungsang atau pinggul ibu yang sempit;
- 4) Kelahiran prematur;
- 5) Ibu kekurangan gizi;
- 6) Kelahiran yang dibantu dengan alat;
- 7) Pertumbuhan tulang tidak sempurna;
- 8) Saat kecil mengalami kecelakaan seperti terbentur pintu, jatuh dari tempat tidur dan lain-lain yang menyebabkan anak mengalami kedisabilitas.

3. Faktor penyakit

Faktor penyakit meliputi *meningitis*, radang otak, *difteri*, *partusis* pada penyandang disabilitas fisik, *syphilis*, *infeksi virus Rubella*, *toxoplasmosis* pada disabilitas netra, *morbili* pada penyandang disabilitas rungu wicara; gangguan kelenjar tiroid, mongoloid pada retradasi mental; dan mengalami trauma pada ekpsikotik.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, timbulnya setiap kedisabilitas yang dialami oleh seseorang secara umum dapat diketahui dari penyebabnya baik sebelum kelahiran dan setelah kelahiran. Penyebab kedisabilitas pada seseorang dilatarbelakangi oleh berbagai masalah sejak dalam kandungan seperti mengalami kelainan genetik, penyakit atau virus berbahaya yang menyerang pada janin. Faktor kondisi kesehatan orang tua juga berpengaruh selama kehamilan.

Faktor kedisabilitas pada seseorang juga dapat diketahui saat proses kelahiran dan pasca kelahiran. Kondisi tersebut mengakibatkan penyandang disabilitas terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, faktor lainnya adalah terserang penyakit dan mengalami musibah atau kecelakaan tertentu.

2.2.2.4 Kategori Penyandang Disabilitas

World Health Organization (WHO) menyatakan terdapat tiga kategori penyandang disabilitas, antara lain:

1. *Impairment*

Orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya.

2. *Disability*

Ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas pada tataran aktivitas manusia normal sebagai akibat dari ketidaknormalan psikologik, psikis, dan kelainan pada struktur organ tubuhnya.

3. *Handicap*

Ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan peran sosial dan ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis pada kondisi kedisabilitas yang dialami.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas secara umum mengalami gangguan dan hambatan yang cukup berarti, sehingga tidak bisa menunjukkan peran dan statusnya di lingkungan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan dan keterbatasan pada seseorang yang dilihat dari aspek fisik serta psikologis penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam berkehidupan.

2.2.2.5 Derajat Kedisabilitas Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur tentang derajat kedisabilitas berdasarkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan aktivitas

keseharian yang terbagi ke dalam 6 derajat, antara lain:

1. Derajat 1
Penyandang disabilitas mampu melaksanakan aktivitas keseharian atau mempertahankan sikap dengan kesulitan atau hambatan.
2. Derajat 2
Penyandang disabilitas mampu melaksanakan aktivitas keseharian atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
3. Derajat 3
Penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas keseharian sebagian besar memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
4. Derajat 4
Penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas keseharian tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain disekitarnya.
5. Derajat 5
Penyandang disabilitas tidak mampu melaksanakan aktivitas keseharian tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
6. Derajat 6
Penyandang disabilitas tidak mampu melaksanakan aktivitas keseharian meskipun dibantu penuh orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas keseharian mengalami keterbatasan yang dapat ditangani secara sendiri maupun tidak sama sekali. Hal tersebut didasarkan pada tingkat keparahan pada kedisabilitas yang dialami oleh seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Semakin parah kondisi kedisabilitas yang terdapat pada seseorang maka perlu bantuan baik berupa alat bantu dan perhatian orang lain dan sebaliknya apabila tingkat keparahan kedisabilitas rendah maka seseorang masih bisa melakukan aktivitas keseharian secara normal tanpa bantuan meskipun mengalami berbagai keterbatasan.

2.2.2.6 Asas Penyandang Disabilitas

Menurut Rahayu (2013: 111) terdapat empat asas yang dapat menjamin aksesibilitas penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kemudahan
Setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Asas kegunaan
Semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Asas keselamatan
Setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
4. Asas kemandirian
Setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangatlah mutlak untuk diwujudkan secara menyeluruh diberbagai sektor kehidupan. Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan fasilitas umum dan layanan publik meskipun memiliki keterbatasan. Penyandang disabilitas wajib disediakan tempat tersendiri untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam penjangkauan pada layanan publik dan fasilitas umum baik dari segi pemerintahan maupun non pemerintahan.

2.2.2.7 Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Hidup; 2) Bebas dari stigma; 3) Privasi; 4) Keadilan dan perlindungan hukum; 5) Pendidikan; 6) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; 7) Kesehatan; 8) Politik; 9) Keagamaan; 10) Keolahragaan; 11) Kebudayaan dan pariwisata; 11) Kesejahteraan sosial; 12) Aksesibilitas; 13) Pelayanan Publik; 14) Perlindungan dari Bencana; 15) Habilitasi dan rehabilitasi; 16) Pendataan; 17) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 18) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; 19) Kewarganegaraan; 20) Berpindah tempat; 21) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan 22) eksploitasi.

Penyandang disabilitas di Indonesia memiliki berbagai hak dan kesempatan yang sama seperti manusia pada umumnya dalam menjalani kehidupan. Pengaturan hak-hak tersebut dapat digunakan menjadi dasar perlindungan dan jaminan bagi penyandang disabilitas agar tidak terjadi pelanggaran hukum mengenai hak asasi manusia. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang rentan, sehingga perlindungan dan jaminan mengenai hak asasi manusia harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa terkecuali.

2.2.2.8 Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Buku Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Cacat Kementerian Sosial RI, menerangkan kebutuhan penyandang disabilitas, antara lain:

1. Perlakuan Khusus yang Berkaitan dengan Jenis Kedisabilitasan

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan yang sama dan juga berbeda dengan sesama penyandang disabilitas jenis lainnya maupun dengan orang tidak disabilitas. Persamaan kebutuhan mereka terletak pada kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Perbedaannya kebutuhan penyandang disabilitas sesuai dengan karakteristik kedisabilitasannya masing-masing.

2. Kebutuhan Pendidikan

Penyandang disabilitas juga mempunyai kebutuhan akan pendidikan formal maupun informal dan non formal agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap orang lain dalam bidang pendidikan, dikenal sistem pendidikan segregasi yaitu pendidikan khusus yang terpisah dari pendidikan anak normal (dalam praktiknya terdapat sekolah khusus/Sekolah Luar Biasa untuk anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tuna daksa). Selain itu, saat ini telah mulai diterapkan sistem pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, yang dimana penyandang disabilitas mengikuti sistem pendidikan formal seperti biasanya.

3. Kebutuhan Ketenagakerjaan

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan selayaknya warga negara lainnya. Peraturan perundang-undangan mengharuskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang berkewajiban mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas. Lapangan pekerjaan menjadi permasalahan bagi mereka yang sudah lulus dari lembaga pelayanan maupun yang tidak masuk ke lembaga pelayanan.

4. Rehabilitasi (Rekreasi dan Terapi)

Pada *setting* lembaga, pelayanan ini didapatkan penyandang disabilitas yang mengikuti program kegiatan lembaga pelayanan (menjadi klien atau warga binaan), sementara di masyarakat sudah ada Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).

5. Bantuan Sosial

Penyandang disabilitas potensial memerlukan bantuan keterampilan. Bagi penyandang disabilitas berat memerlukan bantuan kebutuhan pokok.

6. Aksesibilitas dan Sarana Prasarana Umum yang Dapat Menunjang Aktivitas Sehari-Hari Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memerlukan berbagai fasilitas publik dan fasilitas sosial untuk mempermudah dalam menjangkau dan melaksanakan fungsi sosialnya.

7. Pemeliharaan kesejahteraan sosial (Jaminan Sosial)

Jaminan sosial penyandang disabilitas berat, merupakan program pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang mempertahankan hidup penyandang disabilitas berat. Kriteria penerima jaminan sosial penyandang disabilitas berat adalah: yang memiliki disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi kembali; tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan sendiri, kecuali dengan bantuan orang lain; sepanjang waktu aktivitas kehidupannya sangat bergantung pada bantuan orang lain; tidak tinggal dalam panti dan tidak mampu menghidupi diri sendiri serta berasal dari keluarga miskin. Jaminan sosial ini menjamin adanya penghidupan yang layak untuk sementara waktu agar kehidupannya dapat terus berjalan.

8. Mobilitas dan Teknologi Adaptif bagi Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Kedisabilitasannya (Pelayanan, Alat Bantu dan Sarana Prasarana)

Pernyataan ini sesuai dengan pemikiran *social models* yang menurutnya bahwa penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dengan didukung berbagai teknologi yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya sehingga mobilitas aktivitas tidak terganggu.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa Kementerian Sosial RI menerangkan mengenai berbagai kebutuhan penyandang disabilitas yang perlu diperhatikan. Kebutuhan terhadap penyandang disabilitas harus dapat dipenuhi sebagaimana warga negara lainnya karena memiliki hak dan kesempatan yang sama. Melalui pemenuhan kebutuhan bagi penyandang disabilitas diharapkan menjadi perubahan dalam melanjutkan kehidupan ke arah yang jauh lebih baik.

2.2.3 Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas Intelektual

2.2.3.1 Pengertian Disabilitas Intelektual

Sutjihati Somantri (2007: 103) menjelaskan bahwa disabilitas intelektual merupakan kondisi dimana perkembangan kecerdasan mengalami hambatan sehingga tidak mencapai tahap perkembangan yang optimal. Kemis dan Ati Rosnawati (2013: 10) menyatakan bahwa disabilitas intelektual adalah kelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata dan kelainan yang menunjukkan hambatan dalam perilaku adaptif. Sedangkan menurut *American Association of Intelektual Deficiency* menyatakan bahwa disabilitas intelektual adalah

“Kondisi keterbelakangan intelektual yang menunjukkan fungsi intelektual di bawah rata-rata secara jelas dengan disertai ketidakmampuan dalam penyesuaian perilaku dan terjadi pada masa perkembangan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, disabilitas intelektual adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami keterlambatan perkembangan intelektual yang terjadi sebelum usia 18 tahun, sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah daripada manusia secara umumnya. Selain itu, penyandang disabilitas intelektual juga mengalami kesulitan dalam melakukan adaptasi di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas intelektual memiliki hambatan dan rintangan dalam berpartisipasi secara penuh di masyarakat dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti manusia pada umumnya.

2.2.3.2 Klasifikasi Disabilitas Intelektual

Sutjihati Somantri (2007: 106), klasifikasi disabilitas intelektual berdasarkan derajat kedisabilitasannya adalah sebagai berikut:

1. Ringan

Disabilitas intelektual ringan disebut *debil* atau mampu didik. Berdasarkan Skala Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 68-52. Sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) kelompok ini memiliki IQ antara 69-55.

2. Sedang

Disabilitas intelektual sedang disebut *embisil* atau mampu latih. Berdasarkan Skala Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 51-36. Sedangkan menurut Skala Wischler (WISC) kelompok ini memiliki IQ antara 54-40.

3. Berat

Disabilitas intelektual berat disebut *idiot* atau mampu rawat. Kelompok ini dibedakan menjadi *severe* dan *profound*.

1) *Severe*

Disabilitas intelektual berat disebut *severe*. Berdasarkan Skala Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 32-20. Sedangkan menurut Skala Wischler (WISC) kelompok ini memiliki IQ antara 39-25.

2) *Profound*

Disabilitas intelektual sangat berat disebut *profound*. Berdasarkan Skala Binet, kelompok ini memiliki IQ di bawah 19. Sedangkan menurut Skala Wischler (WISC) kelompok ini memiliki IQ di bawah 24.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas intelektual memiliki tingkatan dari ringan sampai dengan sangat berat mengenai kondisi yang dialaminya. Pengategorian penyandang disabilitas intelektual tersebut didasarkan pada kemampuan (IQ) dimana secara umum memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata manusia normal. Akibat dari kemampuan kecerdasan (IQ) yang rendah maka penyandang disabilitas intelektual memiliki keterlambatan yang berkaitan pada proses belajar sesuai dengan tahap perkembangan. Selain itu, penyandang disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas keseharian baik di dalam rumah maupun di luar rumah yang mengharuskan perhatian dari orang-orang disekitarnya.

2.2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Disabilitas Intelektual

Ratih Putri Pertiwi, dkk (2013: 14) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab disabilitas intelektual adalah sebagai berikut:

1. Genetis atau keturunan

Faktor ini dapat dilihat dari kelainan kromosom pasangan yang tidak

- membelah, sehingga terjadi kekurangan kromosom pada salah satu sel.
2. Metabolisme dan gizi yang buruk
Metabolisme dan gizi yang buruk dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan intelektual. Dampak dari kedua hal tersebut antara lain ketidaknormalan tinggi badan, kerangka tubuh tidak proporsional, persendian kaku, telapak tangan lebar, dan lain-lain.
 3. Infeksi dan keracunan yang bisa terjadi saat kehamilan
Janin dalam kandungan dijangkiti oleh penyakit-penyakit seperti *rubella* dan *sipillis* yang mengakibatkan kedisabilitas intelektual.
 4. Proses kelahiran
Proses kelahiran dibantu menggunakan alat semacam tang untuk menarik kepala bayi yang sulit untuk keluar sehingga menimbulkan kerusakan otak dapat memungkinkan terjadinya kedisabilitas intelektual. Selain itu, bayi yang hypoxia, kejang, dan napas pendek selama proses kelahiran dapat dimungkinkan mengalami hal yang serupa.
 5. Lingkungan buruk
Kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan dini serta pengetahuan dalam memberikan rangsangan positif dalam masa perkembangan anak menjadi penyebab salah satu timbulnya kedisabilitas intelektual.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa timbulnya disabilitas intelektual pada seseorang dikarenakan oleh beberapa faktor baik sebelum kelahiran maupun setelah kelahiran. Selain itu, faktor lingkungan disekitar penyandang disabilitas intelektual juga berpengaruh kuat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman orangtua dalam mendidik dan mencukupi kebutuhan secara material serta non material pada penyandang disabilitas intelektual mengakibatkan kondisi tersebut tidak dapat tertangani dengan baik.

2.2.3.4 Karakteristik Disabilitas Intelektual

James D. Page (1995) mengungkapkan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas intelektual, antara lain sebagai berikut:

1. Kecerdasan intelektual di bawah rata-rata teman sebayanya.
2. Kemampuan bidang sosial mengalami keterlambatan.
3. Fungsi mental mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatian.

4. Perkembangan dorongan dan emosi tergantung dengan situasi.
5. Kemampuan berbahasa sangat terbatas.
6. Mengalami kesulitan pada bidang akademis.
7. Rendahnya tingkat kepercayaan diri.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, secara umum penyandang disabilitas intelektual mengalami berbagai hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari baik yang dapat dilihat dari perilaku yang ditampilkan. Tingkat kecerdasan yang rendah mengakibatkan kemampuan penyandang disabilitas intelektual dalam menjalankan peran dan statusnya mengalami hambatan. Selain itu, penyandang disabilitas intelektual berperan sangat minim di lingkungan masyarakat karena kondisi yang dialaminya.

2.2.3.5 Hambatan pada Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual mengalami hambatan dalam beraktivitas. Sunardi dan Sunaryo (2007) mengemukakan mengenai hambatan-hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas intelektual, antara lain:

1. Hambatan kognitif
Secara umum perkembangan kognitif yang terjadi pada anak tunagrahita hakekatnya sama seperti yang terjadi pada anak normal, namun untuk tahap berfikir yang sifatnya abstrak menjadi wilayah yang sulit dicapai. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa terjadinya keterbelakangan mental dapat berdampak kepada terjadinya hambatan dalam satu atau beberapa proses kognitif seperti bahasa, persepsi, konsentrasi, memori, pemunculan ide-ide dan penalaran.
2. Hambatan motorik
Tentang hambatan perkembangan motorik penyandang disabilitas intelektual mengalami gangguan dalam motorik kasar seperti berjalan, melompat, berlari dan gerak lainnya. Juga dalam motorik halus, seperti menangkap bola dan sebagainya. Kondisi ini dapat disebabkan adanya gangguan pada otak sebagai pusat motorik akibat dari gangguan pada otak sebagai pusat motorik akibat dari gangguan pada pusat persepsi yang berhubungan dengan mental dan intelegensi.
3. Hambatan Komunikasi
Menurut Sutjihati (1996) menjelaskan bahwa anak tunagrahita disamping dalam komunikasi sehari-hari cenderung menggunakan

kalimat tunggal, pada mereka umumnya mereka juga mengalami gangguan dalam artikulasi, kualitas suara, dan ritme, serta mengalami kelambatan dalam perkembangan bicara.

4. Hambatan Sosial

Tingkah laku sosial, tercakup hal-hal seperti ketergantungan, hubungan kesebayaan, konsep diri dan tingkah laku moral. Seperti halnya anak normal, anak tunagrahita yang masih muda-muda memiliki ketergantungan pada orang tua dan orang dewasa lainnya. Dengan bertambahnya umur, ketergantungan ini dialihkan kepada teman sebaya.

5. Hambatan Emosi

Perkembangan emosi berkaitan dengan derajat ketunagrahitaan seorang anak. Penyandang disabilitas intelektual atau tunagrahita tidak dapat menunjukkan dorongan pemeliharaan diri sendiri secara baik.

Berdasarkan pemaparan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan hambatan penyandang disabilitas intelektual dilakukan dengan secara tepat dan sesuai sasaran, sehingga dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya. Cara penanganannya pun berbeda antara penderita penyandang disabilitas intelektual yang ringan dengan yang berat dan tingkat kesulitannya pun juga berbeda. Penyandang disabilitas intelektual yang ringan dapat diberikan penanganan yang lebih kompleks dan teratur. Apabila penyandang disabilitas intelektual berat mereka akan diberikan hal-hal yang mudah dan sederhana sesuai dengan kapasitasnya.

2.2.4 Tinjauan tentang Praktik Pekerjaan Sosial dengan Penyandang Disabilitas

2.2.4.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Menurut Siporin dalam Fahrudin (2014: 61) menyatakan bahwa pekerjaan sosial sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Sedangkan, menurut Zastrow dalam

Suharto (2009:3) pekerjaan sosial merupakan

“Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi- kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuannya. Pekerjaan Sosial dalam intervensi terhadap masalah-masalah sosial diarahkan pada upaya membantu dan menolong individu, keluarga, kelompok dan masyarakat agar dapat berfungsi sosial sesuai dengan status dan peranannya.”

Berdasarkan pendapat di atas, pekerjaan sosial merupakan suatu bidang pelayanan profesional yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan, nilai dan keterampilan sosial. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang membantu orang-orang untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, masyarakat dalam memecahkan masalah yang mereka dihadapi sehingga dapat menolong dirinya sendiri.

2.2.4.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Zastrow dalam Fahrudin (2014 :67) telah berpendapat mengenai tujuan pekerjaan sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya;
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi;
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial;
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

2.2.4.3 Peranan Pekerjaan Sosial

Peranan pekerjaan sosial menurut Sheafor dan Horejsi dalam Suharto (2011:155) sebagai berikut:

1. *Broker*
Peranan sebagai broker, pekerja sosial bertindak untuk menghubungkan klien dengan sistem sumber yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sistem sumber ini diantaranya wali asuh, instruktur menjahit, sesama penerima manfaat serta pembimbing agama.
2. *Enabler*
Pekerja sosial berperan membantu klien untuk menentukan kekuatan-kekuatan dan unsur-unsur yang ada dalam dirinya, termasuk untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan atau untuk mencapai tujuan yang dikehendaki klien.
3. *Motivator*
Pekerja sosial berperan memberikan motivasi terhadap klien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Motivasi mampu meningkatkan semangat klien dalam menghadapi masalah.
4. *Facilitator*
Pekerja sosial berperan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan klien dan membantunya untuk berpartisipasi serta menyimpulkan apa yang telah ia capai.
5. *Educator*
Pekerja sosial berperan sebagai edukator yakni memberikan informasi-informasi yang bersifat mendidik kepada klien. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang hal-hal yang positif dan menuju ke arah perubahan yang lebih baik.
6. *Konselor*
Pekerja sosial membantu klien menyadari kesalahan yang diperbuat. Pekerja sosial selanjutnya memberikan masukan-masukan kepada klien agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan mengajak untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

2.2.4.4 Pengertian Pekerjaan Sosial dengan Penyandang Disabilitas

Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, penyandang disabilitas menjadi bagian yang penting dalam perspektif pekerjaan sosial. Penyandang disabilitas pada dasarnya kondisi kehidupannya sama dengan manusia lainnya. Mereka mempunyai masalah, kebutuhan, dan berhak atas hak-haknya sebagaimana warga negara lainnya.

Sehubungan dengan permasalahan penyandang disabilitas pekerja sosial memiliki tanggung jawab profesi dalam pemberian pelayanan dan intervensi terhadap penyandang disabilitas. Intervensi pekerjaan sosial dalam hal ini bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial (*social functioning*) penyandang disabilitas. Intervensi pekerjaan sosial dengan disabilitas dikemukakan oleh Enung Huripah (2014:10) bahwa:

“Konteks intervensi praktek pekerjaan sosial dalam penanganan masalah penyandang disabilitas bekerja dalam satu tim dengan profesi lain, seperti dokter, psikolog, perawat kesehatan jiwa, dan para profesional lainnya dan perlu dengan jelas mengungkapkan pengetahuan mendasar, keterampilan khusus, dan nilai apa yang menjadi landasan profesi pekerjaan sosial yang bekerja dalam tim yang multidisipliner.

Pekerjaan sosial untuk mengembangkan dan menerapkan intervensi yang dirancang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, professional pekerja sosial telah diposisikan dalam bentuk layanan pada tingkat kebijakan dan untuk bekerja secara langsung dengan orang-orang yang hidup dengan kecacatan (disabilitas).

2.2.4.5 Tugas Pekerja Sosial dengan Penyandang Disabilitas

Pekerja sosial dengan penyandang disabilitas memiliki beberapa tugas, antara lain:

1. Membantu penyandang disabilitas meningkatkan kemampuannya.
2. Mengaitkan penyandang disabilitas dengan berbagai sistem sumber.
3. Memberikan fasilitas interaksi dengan sistem sumber.
4. Mempermudah interaksi diantara penyandang disabilitas.
5. Memberikan sumbangan bagi perubahan kebijakan dan perundang-undangan sosial bagi penyandang disabilitas.
6. Memeratakan atau menyalurkan sumber-sumber material.

2.2.4.7 Peran Pekerja Sosial dengan Penyandang Disabilitas

Permasalahan penyandang disabilitas, semakin kompleks dan menuntut adanya penanganan atau intervensi pekerjaan sosial karena berbagai pengaruh yang kemungkinan dapat terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, profesi pekerjaan sosial menjadi penting artinya dan memiliki tanggung jawab professional dalam

penanganan atau intervensi terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam menangani masalah disabilitas, pekerjaan sosial memiliki peranan yang strategis melalui intervensi baik secara mikro, meso dan makro. Berikut dibawah ini merupakan peran-peran pekerja sosial terhadap penyandang disabilitas:

1. *Motivator*

Pekerja sosial berperan untuk menggugah, menggerak dan membuat klien dinamis. Pekerja sosial harus berani mengambil resiko dan mau membuat terobosan sehingga klien mampu mengembangkan potensinya.

2. *Enabler*

Pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses Sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.

3. *Konselor*

Pekerja sosial memberikan pelayanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya. Pekerja sosial harus menyadari permasalahannya serta melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki klien. Ia juga harus memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah.

4. *Educator*

Pekerja sosial berperan sebagai pendidik dan pemberi informasi kepada klien berkaitan dengan berbagai hal sesuai dengan topik permasalahan yang dihadapi.

5. *Advocator*

Pekerja sosial memberikan layanan pembelaan bagi klien yang berada dalam posisi yang dirugikan sehingga memperoleh haknya kembali.

6. *Broker*

Pekerja sosial dapat berperan sebagai perantara yaitu menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat.